

Judul : Jalur penerbangan terdampak perang, Senayan minta utamakan keselamatan penumpang
Tanggal : Rabu, 04 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jalur Penerbangan Terdampak Perang

Senayan Minta Utamakan Keselamatan Penumpang

Perkembangan situasi geopolitik antara Israel dan Iran yang berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara internasional telah menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan.

KONDISI ini memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global, termasuk potensi dampaknya terhadap konektivitas Indonesia.

"Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan. Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Setiap keputusan pengalih-

an rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan, lanjut Evita, harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal.

Maskapai dan pengelola bandara, tambah politisi PDIP ini, perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.



Evita Nursanty

Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan.

"Saya juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait agar respons berjalan

cepat dan terintegrasi. Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi," tegasnya.

Selain itu, saran Evita, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrian, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini.

"Bagi WNI yang terdampak di luar negeri, koordinasi perlindungan dan layanan informasi juga harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian jalur alternatif dan pendampingan yang memadai," tegasnya.

Kita memahami, kata Evita, bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji.

Komisi VII DPR RI, tegasnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. Stabilitas konektivitas nasional harus tetap terjaga agar dampak ekonomi tidak meluas.

"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," harapnya. ■ **PYB**